

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Kajian Teori yang Berhubungan dengan Topik Penelitian

2.1.1.1. Teori Agensi

Menurut teori agensi Jensen dan Meckling (1976) dalam Pirani (2023), hubungan agensi adalah kontrak pemberian wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada wakil untuk melaksanakan suatu layanan mengatasnamakan prinsipal. Keputusan-keputusan ini meliputi alokasi sumber daya, koordinasi antar subunit, penetapan dan perhitungan biaya, serta kompensasi dan insentif. Menurut Eishardt (1989) dalam penelitian (Hendrastuti & Harahap, 2023) Teori agensi berpijak pada tiga asumsi utama, yang pertama berkaitan dengan sifat manusia, yang melihat manusia sebagai pribadi yang mempunyai kepentingan pribadi, adanya batasan pada aspek rasionalitas (*bounded rationality*) serta kecenderungan untuk tidak mengabaikan mitigasi risiko. Kedua, asumsi yang berkaitan dengan organisasi, yang menekankan potensi konflik kepentingan antaranggota organisasi, serta asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Ketiga, pandangan terhadap informasi sebagai komoditas berharga yang dapat dipergunakan sekaligus ditransaksikan. Teori agensi menekankan karakteristik kooperatif dimana semua pihak yang terlibat harus berkomitmen terhadap kontrak yang telah disepakati, dengan mengikat diri untuk bekerja sama serta mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian Nkechi (2023) menunjukkan bahwa penerapan teori agensi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik, akuntabilitas tersebut menjadi dasar bagi kepatuhan terhadap kebijakan regulasi yang berlaku. Di dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, posisi pemerintah ditempatkan sebagai pihak agen yang dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tata kelola sumber daya kepada prinsipal berdasarkan regulasi standar guna menghasilkan pelaporan yang berkualitas dan wajar.

2.1.1.2. Teori *Resource-Based View*

Teori *Resource-Based View* dari Barney (2018) dalam studi Febriana (2025) mengemukakan bahwa posisi sumber daya manusia diakui sebagai modal strategis institusi yang memegang andil krusial dalam menstimulasi keunggulan kompetitif melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan daerah, ditentukan oleh keberadaan SDM yang ahli di bidangnya serta memiliki dorongan kerja yang kuat akan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi memiliki implikasi yang besar bagi akselerasi kinerja organisasi. Manifestasi dari produktivitas yang semakin optimal tersebut nantinya mampu lebih mudah dicapai oleh organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia berkompetensi tinggi dibandingkan dengan kompetitornya (Dasuki, 2021). Kapabilitas yang dimiliki oleh suatu organisasi diintervensi baik melalui jalur langsung maupun tidak langsung, oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kemampuan operasional memerlukan upaya yang terintegrasi antara sumber daya manusia dan teknologi informasi (Kero & Bogale, 2023). Oleh sebab itu, perbaikan peningkatan

mutu atau kualitas laporan keuangan diposisikan sebagai variabel yang dapat diintervensi melalui adanya penguatan pada aspek kompetensi sumber daya manusia (Lubis, 2023).

2.1.1.3. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori yang dipopulerkan oleh Davis (1986) ini dikenal sebagai *Technology Acceptance Model (TAM)*. Model ini diaplikasikan untuk mengukur penerimaan sistem informasi, di mana keputusan seseorang dalam mengadopsi suatu teknologi dapat ditentukan melalui pendekatan tersebut. Determinan penerimaan sistem informasi (SI) diinvestigasi melalui kerangka TAM, di mana proses evaluasinya didasarkan pada dua konstruk krusial yaitu dipengaruhi oleh persepsi kegunaan serta tingkat kemudahan saat mengoperasikannya. Konstruk psikologis dan perilaku pengguna dalam mengoperasikan teknologi dapat dipetakan secara lebih mendalam melalui pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)* (Hartanti, 2021). TAM menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem dengan lima faktor utama yang mencakup aspek kemanfaatan (*perceived usefulness*), kepraktisan pengoperasian (*perceived ease of use*), respon pengguna (*attitude toward using technology*), serta kecenderungan perilaku untuk mengadopsinya (*behavioral intention to use*) dan penggunaan teknologi sesungguhnya (*actual technology use*) (Santi & Erdani, n.d.).

Perceived usefulness atau kegunaan menurut Davis (1986) dalam penelitian Huda & Waluyowati (2024) merupakan tingkat keyakinan individu bahwa Peningkatan prestasi maupun kinerja para pengguna diyakini dapat didorong melalui pemanfaatan suatu sistem secara optimal. Konsep ini merujuk pada

pandangan pengguna mengenai sejauh mana penggunaan suatu teknologi dianggap berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pencapaian tujuan kerja. *Perceived usefulness* memiliki peran penting dalam menentukan penerimaan dan adopsi teknologi, karena teknologi yang menurut pengguna memberikan manfaat dan berguna maka pengguna cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap teknologi dengan keyakinan manfaat yang akan diberikan oleh teknologi dapat meningkatkan peminat.

Perceived ease of use atau Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai suatu tingkatan keyakinan individu bahwa pengerjaan suatu tugas dapat meminimalkan curahan tenaga dan waktu melalui bantuan sistem tertentu. Persepsi kemudahan ini bersandar pada keyakinan individu bahwa sistem teknologi yang diterapkan bersifat sederhana dan mudah dioperasikan. *Perceived ease of use* berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan teknologi, teknologi yang mudah digunakan cenderung membentuk sikap positif pengguna dan mendorong eskalasi niat individu dalam memanfaatkan teknologi informasi (Huda & Waluyowati, 2024).

Kondisi empiris dari implementasi suatu sistem digambarkan melalui *actual technology use* (penggunaan teknologi sesungguhnya). Stimulus kepuasan individu dalam memanfaatkan instrumen teknologi tersebut sangat bergantung pada persepsi bahwa sistem tersebut mudah dioperasikan serta berkontribusi positif terhadap efisiensi performa kerja. *Actual technology use* mencerminkan sejauh mana teknologi dimanfaatkan dalam praktik, yang dapat dilihat dari frekuensi, durasi, serta intensitas penggunaan (Huda & Waluyowati, 2024).

2.1.2. Kajian Pustaka Tiap Variabel Penelitian

2.1.2.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ketentuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan regulasi bahwa “ tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode tertentu. Melalui laporan keuangan dapat mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang di gunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi kondisi dan efesiensi kinerja entitas, serta memastikan tingkat kepatuhannya terhadap regulasi atau undang-undang yang berlaku”. Sedangkan menurut Febriana (2025) “laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik dan perencanaan Pembangunan daerah”. Suatu entitas pelaporan berkewajiban untuk menyajikan program yang telah dilaksanakan beserta capaian yang diperoleh dari pelaksanaan program yang sudah terencana, sistematis dan terstruktur dalam satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (PP NO 71, 2010).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan sektor publik wajib menyajikan data yang sesuai dan berguna dalam membantu menilai akuntabilitas serta mendukung dalam pengambilan keputusan pada ranah makro yang mencakup aspek finansial, kemasyarakatan, serta kebijakan publik, melalui penyajian data-data di bawah ini:

1. melalui penyediaan data yang komprehensif terkait asal-usul pendanaan, pemplotan anggaran, serta pemanfaatan aktual dari dana tersebut.
2. menyajikan analisis mengenai efektivitas pendapatan berjalan dalam mengover serta menopang seluruh estimasi pengeluaran organisasi.
3. Memaparkan kapasitas sumber daya ekonomi yang di alokasikan untuk kegiatan entitas beserta capaian kinerja yang dihasilkan.
4. Menjelaskan skema pendanaan operasional entitas serta strategi dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas (kas).
5. menyajikan potret komprehensif mengenai postur dan stabilitas keuangan organisasi yang bersandar pada likuiditas jangka pendek, pendanaan jangka panjang, sektor retribusi pajak, serta opsi pembiayaan melalui pinjaman.
6. merefleksikan tren kenaikan atau penurunan performa keuangan entitas yang timbul akibat akumulasi aktivitas operasional dalam satu siklus pelaporan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur laporan keuangan pemerintah daerah tersusun atas beberapa komponen, antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan rincian asal, distribusi, dan penggunaan dana publik. Dokumen ini memperlihatkan perbandingan jelas antara target rencana dan capaian riil selama satu periode akuntansi.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Fluktuasi berupa penguatan atau penyusutan Saldo Anggaran Lebih pada tahun berjalan disajikan di dalam Laporan Perubahan SAL, di mana angka tersebut dikomparasikan langsung dengan posisi pada tahun fiskal sebelumnya.
3. Neraca
Memaparkan kondisi *financial* yang mencakup aset, liabilitas, serta modal pada lini masa yang sudah ditetapkan.
4. Laporan Operasional (LO)
Menginformasikan terkait rangkuman pemakain serta penambahan faktor produksi yang mempengaruhi ekuitas dalam menyelenggarakan program pemerintah selama masa pembukuan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Memaparkan data mengenai mutase masuk dan keluar kas dari sektor operasional, penanaman modal, pembiayaan, serta transitoris yang memperlihatkan rincian saldo awal hingga saldo akhir selama kurun waktu yang ditentukan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
memaparkan analisis komparatif mengenai tren kenaikan serta penurunan struktur modal entitas dengan cara menyandingkannya terhadap capaian fiskal tahun lalu.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan naratif serta rincian angka dari seluruh elemen laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, hingga Laporan Arus Kas disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan mengenai basis kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas juga dimuat pada bagian ini. Guna menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar, informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan wajib diungkapkan di dalamnya.

Laporan keuangan memiliki sifat kualitatif yang berfungsi sebagai tolak ukur normatif dalam penyajian informasi akuntansi agar tujuan pelaporan dapat tercapai. supaya laporan keuangan pemerintah mampu mencapai standar kualitas yang diharapkan, terdapat empat pilar karakteristik kualitatif fundamental wajib diakomodasi dan dipenuhi secara menyeluruh, yaitu:

1. Relevan

Relevansi suatu laporan keuangan diukur dari kemampuan data tersebut dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna, terutama saat melakukan evaluasi terhadap peristiwa historis maupun kondisi mutakhir. Adapun dimensi relevansi ini ditopang oleh beberapa indikator berikut:

- a. Nilai Umpan Balik (Feedback Value), Validasi atau koreksi terhadap proyeksi dan ekspektasi yang telah dibangun sebelumnya oleh para

pengguna dapat dilakukan melalui pemanfaatan data yang disajikan tersebut.

- b. Nilai prediktif (*predictive value*), Proyeksi mengenai kondisi finansial di masa depan dapat disusun oleh para pengguna dengan memanfaatkan data yang disajikan, yang basis analisisnya bertumpu pada rekam jejak historis serta realitas situasi saat ini.
- c. Tepat waktu, Agar dapat menjadi instrumen efektif dalam merumuskan kebijakan dan penentuan keputusan strategis, laporan finansial wajib ditampilkan secara berkala dan sesuai jadwal.
- d. Lengkap, Informasi akuntansi sektor publik dipaparkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan batasan yang ada, guna meminimalkan kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Karakteristik andal mengisyaratkan bahwa data fiskal yang disuguhkan harus steril dari distorsi informasi maupun salah saji material. Representasi yang jujur atas realitas ekonomi serta keterujian data menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Dimensi keandalan ini mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Penyajian Jujur, Transaksi fiskal maupun fenomena ekonomi yang terjadi di lapangan wajib digambarkan secara transparan

melalui penyajian informasi yang objektif dan sesuai dengan realitas senyatanya.

- b. Karakteristik keterujian mengisyaratkan bahwa keabsahan informasi finansial harus dapat dibuktikan kembali oleh penilai luar yang kompeten untuk menghasilkan konklusi yang seragam dan tidak bias.
- c. Netralitas, di mana proses formulasi dan penyusunan informasi wajib diorientasikan pada kemaslahatan publik serta dijaga agar tidak memberikan keuntungan eksklusif bagi kelompok atau pihak terkait.

3. Dapat dibandingkan

Utilitas serta nilai guna dari kualitas dan relevansi informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila komparasi dapat dilakukan, baik terhadap rekam jejak laporan pada periode-periode terdahulu maupun antar-entitas sektor publik yang memiliki karakteristik sejenis.

4. Dapat dipahami

Formulasi informasi serta nomenklatur istilah yang diadopsi di dalam laporan keuangan wajib dikemas sedemikian rupa agar dapat dicerna dan dipahami dengan mudah oleh para penggunanya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, parameter pengukuran terhadap kualitas suatu laporan keuangan dapat ditentukan melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

1. Relevan

Proses pengambilan keputusan oleh para pengguna dapat didukung secara nyata melalui penyajian data laporan keuangan yang akurat, terutama dalam memfasilitasi analisis terhadap peristiwa historis maupun dinamika situasi saat ini.

2. Andal

Keandalan data dalam laporan keuangan wajib dijamin melalui penataan informasi yang steril dari bias yang menyesatkan maupun salah saji material. Setiap fenomena ekonomi harus dipaparkan secara objektif, di mana keabsahan dan validitasnya dapat dibuktikan kembali melalui mekanisme verifikasi yang akuntabel.

3. Dapat dibandingkan

Nilai guna serta kemanfaatan data finansial di dalam pelaporan keuangan bisa dioptimalkan jika proses komparasi dapat dilakukan, baik terhadap rekam jejak pada periode-periode terdahulu maupun antar-organisasi yang setara.

4. Dapat dipahami

Proses artikulasi dan penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan secara terstruktur serta sistematis agar dapat diinterpretasikan secara jelas dan komprehensif oleh para pemangku kepentingan.

2.1.2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAPBA)

Formulasi serta pembuatan laporan keuangan di lingkup birokrasi pemerintahan wajib berdasarkan pada regulasi akuntansi baku yang diadopsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi tersebut memberikan panduan dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan menurut Gunawan & Sujana (2023) Perwujudan akuntabilitas, transparansi tata kelola keuangan dan aset, serta sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dapat diakomodasi melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, PSAP dapat diukur dengan menggunakan matriks penilaian dan indikator empiris yang dijabarkan dalam poin-poin berikut:

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Kewajiban untuk menyelaraskan pelaporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui pengadopsian basis akrual secara penuh telah digariskan di dalam regulasi ini.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Mengatur bahwa formulasi serta Penyajian Laporan Realisasi Anggaran harus menggunakan basis kas.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Kewajiban untuk merekonstruksi laporan *cash flow* pada setiap siklus pelaporan berkala dibebankan kepada otoritas pemerintah pusat dan daerah yang telah menerapkan basis akrual, sebagai bagian integral dari komponen utama laporan finansial.

4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan

Regulasi mengenai mekanisme artikulasi serta pengungkapan elemen data di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dirumuskan demi mengeskalasi derajat transparansi fiskal, sekaligus menstimulasi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap performa finansial sektor publik.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Regulasi ini diposisikan sebagai kerangka acuan yang wajib diimplementasikan dalam proses pengakuan serta artikulasi seluruh pos aset lancar berupa persediaan pada *financial report* berorientasi umum (*general purpose financial statements*)

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Regulasi ini diposisikan sebagai kerangka acuan yang wajib diimplementasikan dalam proses artikulasi serta pelaporan seluruh instrumen penempatan modal negara pada instrumen keuangan bertujuan umum, demi menjaga keselarasan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Kerangka regulasi beserta penanganan akuntansi bagian aktiva tetap disusun dalam poin ini, yang mencakup tahapan rekognisi awal, estimasi nilai buku, hingga penetapan metode revaluasi serta pengakuan terhadap penurunan nilai buku (*book value*) aset terkait.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan

Regulasi ini diposisikan sebagai kerangka acuan dalam memformulasikan perlakuan akuntansi bagi seluruh aset infrastruktur yang masih berada dalam tahapan konstruksi atau pengerjaan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Mekanisme perlakuan akuntansi untuk pos liabilitas diatur dalam ketentuan ini, yang mencakup penetapan saat pengakuan, estimasi nilai buku yang disajikan, metodologi amortisasi, hingga prosedur pembebanan atas biaya pinjaman terkait.

10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan

Mengatur tata cara perlakuan akuntansi mengenai penyelesaian kekeliruan pencatatan, penyesuaian kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta perlakuan atas aktivitas operasional yang diberhentikan.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Mekanisme penyatuan instrumen pelaporan keuangan konsolidasi di berbagai lini unit kerja instansi publik diatur di dalam ketentuan ini, demi memformulasikan laporan keuangan bertujuan umum (general

purpose financial statements) yang lebih komprehensif dan kredibel. Penyusunan regulasi tersebut diorientasikan untuk mengintegrasikan basis data yang representatif bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak terkecuali badan legislatif.

2.1.2.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kapabilitas seseorang dalam mengemban dan menyelesaikan suatu penugasan didefinisikan sebagai kompetensi, di mana hal tersebut merepresentasikan proses integrasi antara aspek teoretis, keahlian praktis, atribusi sikap, serta internalisasi nilai personal, yang disertai dengan kapasitas untuk memperluas cakrawala keilmuan berdasarkan refleksi pengalaman maupun proses pembelajaran yang berkelanjutan. Di sisi lain, seluruh kapasitas keahlian yang melekat pada diri individu, baik dalam dimensi mental maupun fisik, dikategorikan sebagai sumber daya manusia (Mitjo et al., 2022). Karakteristik dan mutu *financial report* secara signifikan ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengemban tugas dalam proses formulasinya. Akselerasi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh personel penyusun akan berimplikasi langsung pada penguatan kualitas output pelaporan keuangan yang dihasilkan (Faisal et al., 2024).

Berdasarkan model kompetensi yang dikembangkan oleh Spencer & Spencer (1993) dalam penelitian Diwanti & Hariyanto (2022) Tingkat kecakapan dan kompetensi SDM dapat diukur melalui pemanfaatan beberapa indikator di bawah ini:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Akumulasi informasi spesifik yang dikuasai oleh seorang individu di dalam ranah keilmuan tertentu diartikan sebagai pengetahuan. Elemen ini diposisikan sebagai aset strategis bagi institusi. Kemajuan dan eskalasi kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh seberapa besar investasi yang dialokasikan pada pengembangan modal intelektual, penguatan aset pengetahuan, serta internalisasi nilai-nilai keilmuan tersebut.

2. Keterampilan (*skill*)

Kapabilitas fisik maupun taktis seorang individu dalam menuntaskan suatu penugasan didefinisikan sebagai keterampilan. Atribut ini merupakan kapasitas operasional yang diaktualisasikan guna menyelesaikan berbagai tanggung jawab, di mana potensinya dieksplorasi dan dikembangkan melalui stimulasi pelatihan berkala serta akumulasi pengalaman empiris. Derajat keahlian seseorang secara langsung akan terefleksikan dari tingkat efisiensi dan efektivitas hasil kerja yang ditunjukkan.

3. Sikap (*attitude*)

Dimensi fisik, sosial, dan psikologis seseorang tertuang dalam bentuk sikap, yang diartikan sebagai cara pandang individu terhadap eksistensi dirinya sendiri. Alih-alih bersifat hereditas atau bawaan, konsep ini dibentuk dan dipelajari secara bertahap melalui proses sosialisasi serta jalinan interaksi dengan orang lain sepanjang hidupnya.

2.1.2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sejauh mana teknologi informasi diintegrasikan ke dalam pelaksanaan prosedur akuntansi merepresentasikan esensi dari pemanfaatan teknologi informasi

itu sendiri. Aturan mengenai kewajiban penggunaan instrumen digital ini telah diundangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 tentang SIKDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah), yang hadir sebagai regulasi substitusi atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 terkait informasi keuangan daerah. Efektivitas penyusunan laporan keuangan di tingkat regional serta kelancaran aktivitas operasional instansi sangat di pengaruhi oleh adanya keterlibatan infrastruktur teknologi, baik berupa komponen perangkat keras maupun perangkat lunak (Maspaiteella & Mokodompit, 2022). Komponen teknologi informasi didefinisikan oleh Ridzal (2022) sebagai struktur yang mengintegrasikan perangkat lunak (software), basis data (database), sistem jaringan, peranti elektronik, serta instrumen teknologi pendukung lainnya. Dinamika perkembangan teknologi ini terjadi secara akseleratif dari waktu ke waktu, yang dicirikan oleh tingginya aksesibilitas informasi berbasis internet. Eksistensi teknologi informasi dipandang sebagai bentuk konvergensi antara teknologi komputerisasi dan telekomunikasi, di mana fungsinya difokuskan pada pengolahan, retensi, serta diseminasi data keuangan (Aldino & Septiano 2021).

Merujuk pada Technology Acceptance Model (TAM) atau yang diidentifikasi sebagai Model Persetujuan Teknologi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Perceived usefulness atau kegunaan menurut adalah keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja. Persepsi ini berperan penting dalam penerimaan teknologi, karena teknologi

yang dianggap bermanfaat dan berguna cenderung mendorong sikap positif dan meningkatkan intensitas pengguna (Huda & Waluyowati, 2024).

2. Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease Of Use*)

Perceived ease of use atau kemudahan pengguna adalah keyakinan pemakai yakni sistem tersebut *user friendly*, sehingga memacu sikap positif serta meningkatkan niat untuk memanfaatkan teknologi (Huda & Waluyowati, 2024).

2.1.3. Keterkaitan Antara Variabel Penelitian

2.1.3.1. Keterkaitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam konsep teori keagenan, interaksi antara pemilik sumber daya (principal) dan pengelola (agent) diposisikan sebagai sebuah hubungan kontraktual yang mengikat kedua belah pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada principal melalui penyajian laporan keuangan pemerintah yang terpercaya dan terbuka (Pirani et al., 2023). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berperan sebagai regulasi yang menyediakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara *principal* dan *agent*. Dengan penerapan SAP yang baik dan sesuai, informasi keuangan menjadi lebih sesuai, terpercaya, sebanding dan bisa dimengerti. Dengan penerapan SAP yang konsisten dan berdasarkan ketentuan

dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, serta memperkuat tanggungjawab dan tranparansi sebagai wujud pertanggungjawaban agen kepada principal (Husin et al., 2025).

2.1.3.2. Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori *Resource-Based View* menekankan bahwa Sumber daya manusia diposisikan sebagai sebuah aset penting yang dikuasai dan dikelola oleh organisasi yang memiliki fungsi utama dalam mewujudkan keunggulan kompetitif melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penguasaan terhadap regulasi atau standar yang berlaku, kepemilikan kemampuan teknis, serta pengalaman dan profesionalisme dalam mengelola informasi keuangan merupakan keahlian yang harus dimiliki pegawai dalam Menyusun *financial report*. Dengan SDM yang kompeten di bidangnya mampu menyajikan laporan finansial yang berdasarkan regulasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan menyediakan data finansial yang sesuai, terpercaya, sebanding, dan bisa dimengerti (Lubis, 2023).

2.1.3.3. Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa menerima dan menggunakan digital dipengaruhi oleh kemudahan dan kegunaan teknologi. Dalam pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan efektivitas, efesiensi dan keandalan

informasi keuangan. Pemanfaatan teknologi yang diterima dan digunakan secara optimal dapat mempercepat dalam proses pencatatan, pengolahan, dan penyampaian laporan keuangan, serta meminimalkan kekeliruan manusia (*human error*). Kualitas dari laporan keuangan yang disajikan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana optimalisasi pemanfaatan teknologi dilakukan oleh organisasi, karena semakin tinggi persepsi kemudahan dan kegunaan teknologi serta semakin optimal dalam memanfaatkannya maka laporan finansial pada akhirnya akan memiliki nilai mutu yang baik (Huda & Waluyowati, 2024).

2.1.3.4. Keterkaitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori agensi menjelaskan hubungan *principal* dan *agent*, dimana *principal* menuntut tanggungjawab dan keterbukaan dalam mengelola anggaran pemerintah. Kualitas laporan finansial yang dihasilkan menjadi sarana utama pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berfungsi sebagai regulasi dalam membuat laporan keuangan yang sesuai, terpercaya, sebanding dan bisa dimengerti. Selain regulasi, mutu laporan keuangan juga ditentukan oleh aparatur pemerintah yang kompeten (Pirani et al., 2023). Berdasarkan teori *Resource-Based View* (RBV), keahlian sumber daya manusia merupakan aset penting yang bernilai. SDM yang mempunyai *knowledge*, *skill*, dan pemahaman terhadap standar yang berlaku serta mampu membuat laporan finansial secara tepat, akurat dan sesuai ketentuan (Lubis, 2023).

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), derajat pemanfaatan sebuah sistem dipengaruhi secara signifikan oleh sudut pandang pengguna terkait kemudahan dan kegunaan praktis dari teknologi tersebut. Teknologi informasi yang dimanfaatkan dengan baik bisa meningkatkan efesiensi, tepat waktu, serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan, yang pada akhirnya berdampak baik terhadap kualitas laporan finansial (Huda & Waluyowati, 2024). Oleh sebab itu, penerapan SAP yang didukung oleh SDM yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan komponen penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

2.1.4. Review Hasil Penelitian terdahulu

Terdapat sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan riset yang dilakukan penulis:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis		Jurnal		Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Standar Pemerintahan Akrua, Sumber Daya Dan Pengendalian Terhadap	Penerapan Akuntansi Berbasis Kompetensi Manusia, Kualitas	JIMAT Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)	(Jurnal 1)	Hasil penelitian menunjukkan, Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng,

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng_ Gunawan dan Sujana (2023)	2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng, 3) Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten buleleng.
--	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

4. Terdapat perubahan variabel pada variabel X3
5. Terdapat perbedaan jumlah responden
6. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

2.	Pengaruh Standar Pemerintah Akrua, Pengendalian Dan Keuangan Kaulitas	Penerapan Akuntansi Berbasis Sistem Internal Pengawasan Terhadap Laporan	J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih besar dari
----	---	--	--------------------------------	--

Keuangan Di SKPD Kabupaten Bantul_ Pirani, Rifandi dan Anam (2023)	0,05 yaitu 0,277, sedangkan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 dan 0,000.
--	---

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X2 dan X3
2. Terdapat perbedaan dalam penggunaan metode pemilihan sampel
3. Terdapat perbedaan dalam jumlah responden
4. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

3.	Pengaruh Kompetensi JAIM: Jurnal Kompetensi Sumber Daya Sumber Daya Manusia Akuntansi Manado Manuasia berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas dengan kualitas Laporan Laporan Keuangan keuangan SKPD Kabupaten Pemerintah Daerah Halmahera Utara dengan tingkat Kabupaten Halmahera hubungan kuat dan positif Utara_ FS Mitjo, Kawatu, dan tangkau. (2022)
----	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

-
1. Adanya penambahan variabel baru yaitu X2 dan X3
 2. Terdapat perbedaan dalam penggunaan metode pemilihan sampel
 3. Terdapat perbedaan jumlah responden
 4. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
-

4.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan_ Faisal, Indriyani, Mayang, dan Muhamad. (2023)	Jurnal Maneksi	kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, adapun sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Koperasi Mitra Madani Sejahtera.
----	---	----------------	--

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X2 dan adanya penambahan variabel baru yaitu X3
 2. Terdapat perbedaan jumlah responden
 3. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
-

5.	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah, Sedangkan
----	---	---------------------------------	---

	Keuangan	Pemerintah			pengendalian intern berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah.
	Daerah	Kabupaten Buton Selatan_	Ridzal, Sujana, dan Malik. (2022)		
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:					
	1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X1 dan X3 2. Terdapat perbedaan dalam penggunaan metode pemilihan sampel 3. Terdapat perbedaan jumlah responden 4. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian				
6.	Pengaruh Sistem Keuangan Daerah, Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)_	Penerapan Akuntansi Pemerintah Pemanfaatan Perangkat	Jurnal Review Ilmiah dan Bisnis	Ekombis – Jurnal Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pada OPD Provinsi DKI Jakarta berpengaruh positif. Secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian intern menunjukkan pengaruh positif parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X1 dan X3
2. Terdapat perbedaan jumlah responden
3. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian

7.	Pengaruh Internal, Kualitas Daya Manusia dan Penerapan Basis Akrua Terhadap Laporan Pemerintah (Febriana, Mahmud, dan Mauzu, 2025)	Pengawasan Sumber Manusia dan Kualitas Keuangan Daerah_	Atestasi: Ilmiah Akuntansi	Jurnal	Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan valid (nilai korelasi Pearson > r-tabel) dan reliabel (<i>Cronbach's Alpha</i> > 0,70). Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah, dengan kontribusi terbesar ditunjukkan oleh pengawasan internal dan kualitas SDM. Nilai koefisien determinasi (R ²) sebesar 66,6% mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan variasi
----	--	---	----------------------------	--------	---

kualitas laporan keuangan secara cukup kuat.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X1 dan X3
 2. Terdapat perbedaan jumlah responden
 3. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
-

8. The Quality Of Local Global Financial Dari keempat variabel yang Government Financial Accounting Journal diteliti, terdapat tiga variabel, Report_ yaitu kompetensi sumber daya Maspaitella dan manusia, sistem informasi Mokodompit (2022) akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel sistem pengendalian intern pemerintah merupakan satu-satunya variabel yang memiliki nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah
-

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

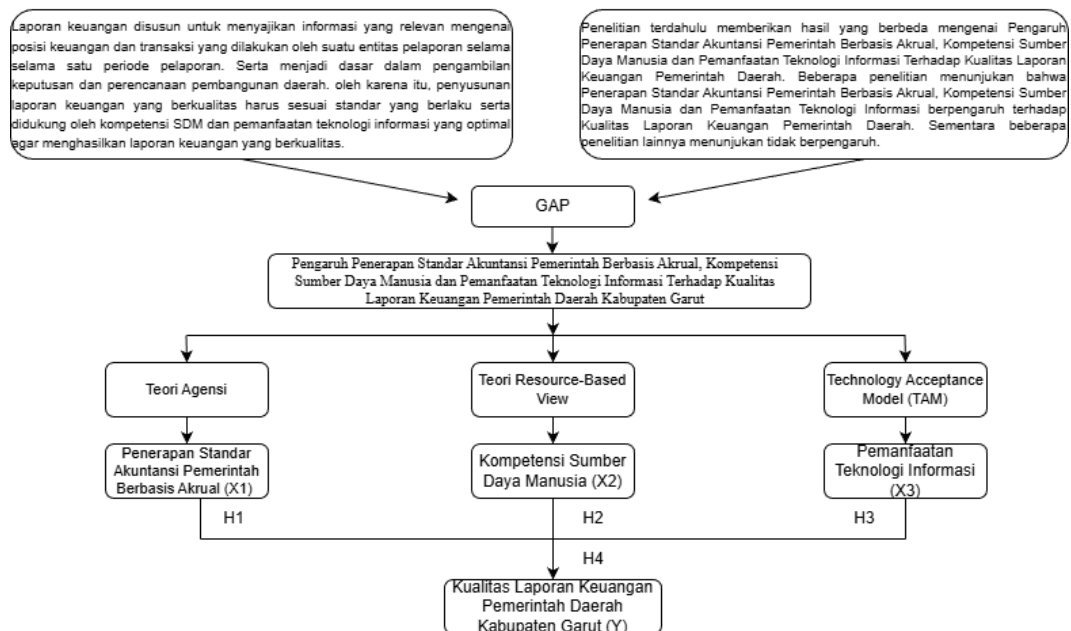
Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan variabel pada variabel X2
 2. Terdapat perbedaan jumlah responden
 3. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian
-

Sumber: diolah oleh penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara esensial ditentukan oleh sejauh mana implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (SAPBA), tingkat kemampuan SDM, dan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi. Akselerasi pada penerapan SAP, kapasitas SDM, serta integrasi teknologi informasi diyakini mampu meningkatkan mutu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Merujuk pada pemaparan tersebut, bagan kerangka pemikiran dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Penelitian

2.3 Hipotesis

Jawaban proporsional yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang umumnya diajukan dalam format pertanyaan disebut sebagai hipotesis. Sintesis ini dikategorikan sementara lantaran dasar yang dikemukakan baru mengacu pada justifikasi teoretis dan belum berbasis pada bukti empiris dari hasil reduksi data. Merujuk pada kerangka pemikiran dan hasil riset terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- H2: Terdapat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kulitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- H3: Terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

